

JEPANG TERBUKA BAGI BANGSA ASING

Elfika Pakpahan¹, Melsa², Alya Rizkika Zahra³, Desti Amanda⁴, Fatonah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Jambi

elfikapakpahan@gmail.com¹, meellsaa62@gmail.com², alyarizkika86@gmail.com³,
destiamanda40@gmail.com⁴, fatolah.nurdin@unja.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas peristiwa terjadinya keterbukaan jepang terhadap bangsa asing dalam beberapa abad yang lalu. Dengan prinsip kebijakan imigrasi yang lebih terbuka dan meningkatkan akses terhadap budaya asing, jepang terus berusaha dalam menanggapi tantangan globalisasi dan memperkuat posisinya di bidang internasional melalui evaluasi kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi dan pengaruh budaya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Heuristik, Interpretasi, dan Historiografi. Mengeksplorasi dampak keterbukaan terhadap masyarakat jepang serta bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan interaksi dengan negara lainnya. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi, termasuk resistensi budaya dan isu integrasi sosial. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang signifikan, jepang tetap perlu mengatasi berbagai macam hambatan untuk mencapai masyarakat yang benar-benar terbuka.

Kata Kunci: Peristiwa jepang, Perdagangan, Jepang, Restorasi Meiji.

Abstract

This study discusses the events of Japan's openness to foreign nations in the past few centuries. With the principle of a more open immigration policy and increasing access to foreign cultures, Japan continues to strive to respond to the challenges of globalization and strengthen its position in the international field through evaluation of government policies, economic developments and cultural influences. In this study, the methods used are Heuristics, Interpretation, and Historiography. Exploring the impact of openness on Japanese society and how it affects interaction with other countries. The study highlights the challenges faced, including cultural resistance and issues of social integration. The findings suggest that despite

significant progress, Japan still needs to overcome a range of obstacles to achieve a truly open society.

Keywords: *Japanese events, Trade, Japan, Meiji Restoration.*

PENDAHULUAN

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam hubungan dengan bangsa asing. Selama berabad-abad, negara ini dikenal sebagai negeri yang cenderung tertutup terhadap pengaruh luar, terutama selama periode Edo (1603-1868), ketika pemerintah Tokugawa menerapkan kebijakan isolasi yang dikenal sebagai sakoku. Kebijakan ini membatasi interaksi dengan bangsa asing, baik dalam bidang perdagangan, budaya, maupun politik. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan adanya berbagai tekanan internasional, Jepang mulai membuka diri dan beradaptasi dengan dunia luar. Pembukaan Jepang terhadap bangsa asing merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun pengaruh eksternal. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah keterbukaan Jepang terjadi pada pertengahan abad ke-19, ketika Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuka pelabuhannya bagi perdagangan internasional melalui Konvensi Kanagawa pada tahun 1854. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Jepang dan menandai awal mula modernisasi negara tersebut. Sejak saat itu, Jepang mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Modernisasi yang berlangsung pesat pada era Restorasi Meiji (1868-1912) membuat Jepang semakin terbuka terhadap pengaruh asing, baik dalam hal teknologi, militer, maupun sistem pemerintahan. Jepang mulai mengadopsi berbagai praktik dan inovasi dari negara-negara Barat guna memperkuat posisinya sebagai kekuatan global.

Dalam perkembangannya, keterbukaan Jepang terhadap bangsa asing tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi dan politik, tetapi juga merambah ke bidang budaya dan sosial. Misalnya, pada era pasca-Perang Dunia II, Jepang menjadi salah satu pusat global dalam bidang industri, pendidikan, dan hiburan, yang menarik banyak perhatian dari masyarakat internasional. Jepang juga mulai menerima lebih banyak tenaga kerja asing dan wisatawan, sehingga meningkatkan interaksi dengan berbagai bangsa. Meskipun demikian, keterbukaan Jepang terhadap bangsa asing juga menghadapi tantangan tersendiri. Sikap konservatif sebagian masyarakat Jepang, kebijakan imigrasi yang ketat, serta perbedaan budaya menjadi

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap orang asing di negara tersebut. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk lebih membuka diri, termasuk dengan memberikan lebih banyak peluang bagi tenaga kerja asing, memperkenalkan kebijakan visa yang lebih fleksibel, serta meningkatkan kerja sama dengan komunitas internasional.

Sejarah Jepang menarik perhatian banyak orang karena berbagai pencapaian dan peristiwa penting terjadi dalam prosesnya. Awalnya, Jepang dikenal sebagai bangsa Asia pertama yang berhasil meniru perkembangan industri Eropa. Pada awal abad ke-20, Jepang menunjukkan kemampuannya menghadapi kekuatan Eropa dengan mengalahkan Rusia dalam perang Rusia-Jepang (1904-1905) dan Cina dalam perang Cina-Jepang I (1894-1895) menggunakan teknologi modern. Hasil kemenangan tersebut tidak membuat Jepang puas, sebaliknya. Mereka menjadi semakin agresif. Jepang terlibat dalam Perang Dunia I dan memiliki ambisi untuk membentuk negara Asia Timur Raya. Cita-cita inilah yang membawa Jepang ke dalam Perang Dunia II, yang berujung pada kehancuran negara tersebut. Namun, setelah Perang Dunia II, Jepang bangkit dengan cepat sebagai negara industri yang maju, bahkan melampaui kondisi sebelum perang. Saat ini, Jepang dikenal sebagai salah satu negara maju dengan industri besar dunia dan mampu bersaing dengan Amerika Serikat. Sejarah kekuasaan Jepang di bagi menjadi tiga masa yaitu: Masa Kuno, Masa Meiji Restorasi, dan Masa Setelah perang Dunia II.

Jurnal "Jepang Terbuka bagi Bangsa Asing" membahas berbagai aspek dari proses keterbukaan Jepang ini, mulai dari sejarah, faktor pendorong, dampak yang ditimbulkan, hingga tantangan yang dihadapi. Dengan memahami bagaimana Jepang membuka diri terhadap bangsa asing, kita dapat melihat bagaimana negara ini berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan budaya terbesar di dunia saat ini, serta bagaimana interaksi dengan dunia luar terus membentuk identitas dan dinamika sosialnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sejarah yaitu Heuristik Interpretasi, dan Historiografi. Ada pun hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah, (1) Jepang membuat kebijakan penutupan diri atau kebijakan Sakoku, yang merupakan politik isolasi. larangan orang Jepang pergi ke luar negeri dan melakukan pembatasan yang sangat ketat

terhadap para pedagang dari negara lain. (2) Kedatangan portugis ke jepang melalui masa perang saudara memberikan banyak pengaruh besar, salah satunya memperkenalkan senjata api dan berkembangnya agama kristen katolik . (3) Politik Isolasi atau Kebijakan Sakoku berlangsung hingga akhirnya dibuka Jepang secara terpaksa akibat ekspedisi dari komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat. Seorang pemimpin armada kapal serang yang dikirim Amerika Serikat, untuk memaksa pembukaan pelabuhan jepang bagi perdagangan Amerika. Amerika tidak segan-segan menggunakan ancaman kapal serang, sehingga shogun terpaksa menandatangani perjanjian damai dalam konvensi kanagawa pada 31 Maret 1854. Melalui perjanjian tersebut, Jepang perlahan luluh untuk membangun hubungan Diplomatik formal bersama dengan Amerika Serikat. Tidak hanyaa itu, Jepang juga menandatangani perjanjian serupa dengan negara-negara barat lainnya. Bersamaan dengan itu, kebijakan Sakoku pun berakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa Pembukaan Jepang

Pada abad ke-18 Perlombaan akibat revolusi industri di Inggris terjadi, sehingga bangsa Eropa dan Amerika berlomba-lomba untuk mencari wilayah baru untuk memperluas hubungan dagang mereka. Beberapa negara Eropa mulai berhasil menguasai sejumlah negara di kawasan Asia Selatan maupun Asia Tenggara hingga ingin meluaskan ke wilayah Timur. Di saat sedang mencari wilayah baru untuk perdagangannya ke wilayah Timur, Jepang mulai dilihat oleh bangsa barat.

Pada tahun 1633-1854 masa kepemimpinan Shogun Tokugawa Lemitsu, Menerapkan kebijakan Sakoku atau politik isolasi. Tujuannya diterapkan kebijakan Sakoku untuk mengurangi pengaruh asing di Jepang, terutama Portugis. Kedatangan Portugis melalui perang saudara, sehingga Portugis memberikan banyak pengaruh besar kepada Jepang dalam bidang perdagangan, agama, dan militer. Portugis bersama Bangsa Eropa lainnya berdagang dengan bangsa Jepang, pengaruh tersebut memicu kebijakan Sakoku yang membatasi secara ketat pengaruh asing yang masuk ke dalam negeri, serta warga Jepang tidak di perbolehkan pergi meninggalkan Jepang. Ditetapkannya kebijakan Sakoku dilatar belakang dengan kekhawatiran pemerintah Jepang terhadap kedatangan bangsa Portugis dengan semboyannya 3G yaitu Gold, Glory, Gospel. Kekhawatiran pemerintah Jepang akan terjadinya Kolonialisme dan Imperialisme dalam Jepang, pengaruhnya mulai terlihat secara perlahan. Contohnya penyebaran

agama Kristen dan Katolik secara pesat, Dimana masyarakat Jepang menganut agama Buddha dan kepercayaan Shinto yang telah lama hidup berdampingan.

Bangsa Portugis pertama kali datang ke Jepang pada tahun 1543. Agama Kristen dan Katolik dipercaya baru masuk ke Jepang pada tahun 1550 melalui misionaris asal Spanyol bernama Fransiskus Xaverius. Fransiskus Xaverius mendekati para daimyo lokal untuk meminta izin menyebarkan agama Kristen, lalu disambut dengan damai oleh Oda Nobunaga dan menyebar dengan cepat di Jepang salah satunya di Nagasaki yang kemudian menjadi kota Kristen pertama di Jepang. Penyebaran agama Kristen Katolik di Jepang, mulai di anggap ancaman bagi pemerintah Tokugawa. Sehingga Masyarakat Jepang yang sudah menganut Kristen dipaksa untuk membuktikan bahwa mereka bukan Kristen dengan menginjak sebuah fumie bergambar salib, Yesus, atau Bunda Maria. Penganiayaan ini terhadap umat Kristen terus meningkat di Jepang, para penganut kakure Kirishitan beribadah secara tertutup dengan memburai peralatan ibadah mereka seperti Rosario dan patung Bunda Maria menjadi peralatan ibadah Budha. mereka hidup dengan sangat tertutup dan cenderung tidak mau mengambil resiko untuk meninggalkan Desa mereka, pemberontakan shimabara yang terjadi melibatkan kaum petani, orang Kristen dan Ronin di wilayah Semenanjung Shimabara, provinsi hidden, Jepang ini merupakan pemberontakan bersenjata militer. Akibat dari pemberontakan ini penduduk di kota berkurang secara drastis dan pelarangan agama Kristen semakin dipertegas sehingga semua masyarakat Jepang diwajibkan untuk mendaftar di kuil-kuil Budha untuk membuktikan bahwa mereka non Kristen. Pemberontakan ini dikarenakan oleh pajak yang berat, penindasan terhadap orang Kristen serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat setempat.

Sejak kebijakan Sakoku diberlakukan, perdagangan Jepang dengan negara luar negeri sangat terbatas, meskipun Jepang membatasi hubungan dagang mereka, Jepang tetap terlibat dalam diskusi bersama Belanda dan Korea. Dengan tujuan diskusi tiga negara ini untuk memastikan kegiatan seluruh aktivis perdagangan tidak mengalami gangguan. Eropa pada saat itu sedang mengalami perubahan besar-besaran dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, teknologi, dan sosial. Transformasi ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti kemajuan teknologi, perubahan demografi dan tantangan global yang semakin kompleks. Sementara itu, Jepang menghadapi masalah internal yang sangat signifikan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Jepang meliputi: Sedikitnya generasi muda yang dapat mendukung ekonomi, Ekonomi yang pertumbuhannya lambat dan tingkat inflasi rendah, serta ketidakpuasan di kalangan masyarakat

Jepang terkait; pekerjaan, kesejahteraan, dan ketidaksetaraan. Dimana mereka menuntut perubahan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua wilayah ini menunjukkan perubahan global dan tantangan domestik yang saling mempengaruhi.

Pada tanggal 18 Juli 1853, Komodor Amerika Serikat Matthew Perry memimpin keempat kapalnya ke pelabuhan di Teluk Tokyo, untuk membangun kembali perdagangan dan wacana reguler antara Jepang dan bangsa Barat untuk pertama kalinya dalam lebih dari 200 tahun. Matthew Perry pemimpin armada kapal perang yang dikirim oleh presiden Amerika Serikat, Millard Fillmore untuk memaksa pembukaan pelabuhan Jepang bagi perdagangan Amerika. Bahkan mereka tidak segan untuk mengancam menggunakan kapal perang jika diperlukan. Shogun terpaksa menandatangani perjanjian damai dalam konvensi Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Dengan perjanjian tersebut, Jepang setuju untuk membangun hubungan diplomasi formal dengan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Jepang juga menandatangani perjanjian serupa dengan negara-negara barat lainnya. Seperti Rusia dan Inggris. Dampaknya Jepang mau tidak mau membuka kembali hubungan dagang mereka dengan negara asing lainnya, sehingga kebijakan Sakoku berakhir.

Dampak Pembukaan Jepang

Dampak yang dirasakan Jepang setelah membuka diri setelah lama mengisolasi diri ialah kekacauan, Kekacauan yang terjadi di Jepang melibatkan banyak pihak dari berbagai kalangan. ialah Inggris, Belanda, dan Perancis. Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara pertama yang membuka Jepang tidak begitu banyak terlibat, karna pada tahun 1862-1865 tengah dibisukan oleh perang saudara yang terjadi di negaranya. Rusia menunjukkan sikap berbeda dengan tidak ikut serta dalam kekacauan yang melanda Jepang. Alasannya, negara tersebut tengah mengejar kepentingan lain di wilayah utara dan menilai aktivitas perdagangan dengan Jepang kurang memberikan manfaat berarti.

Pembukaan Jepang terhadap dunia luar yang terjadi pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa ternyata memicu kekacauan internal. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut diambil tanpa persetujuan dari Kaisar, yang masih dianggap sebagai simbol legitimasi tertinggi. Akibatnya, kelompok-kelompok yang sejak awal tidak mendukung pemerintahan Shogun melihat peluang untuk melemahkan kekuasaan Tokugawa. Mereka semakin bersemangat untuk menggulingkan kekuasaan Shogun dan memulihkan otoritas tunggal di bawah Kaisar. Situasi semakin genting ketika kelompok radikal yang dikenal sebagai *Shishi* (kaum loyalis Kaisar)

mulai melakukan aksi kekerasan, termasuk serangan dan pembunuhan terhadap warga asing yang dianggap mewakili pengaruh luar yang merusak Jepang.

Dalam struktur politik pada masa pemerintahan Tokugawa, para *daimyo* atau tuan tanah besar dibagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, *Shimpan*, yakni *daimyo* yang masih memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga Tokugawa. Kedua, *Fudai*, yaitu *daimyo* yang menjadi sekutu setia Tokugawa dan turut berperan penting dalam kemenangan mereka pada Perang Sekigahara. Ketiga, *Tozama*, atau disebut juga *daimyo* luar, adalah mereka yang bukan keturunan Tokugawa dan sebelumnya merupakan pendukung Toyotomi Hideyoshi, lawan politik Tokugawa yang kalah dalam Perang Sekigahara yang berlangsung dari September hingga Oktober tahun 1600 (berdasarkan kalender Gregorian).

Dari ketiga kelompok *daimyo*, *Tozama* adalah yang paling tidak puas terhadap pemerintahan Tokugawa. Ketidakpuasan ini muncul karena mereka diperlakukan berbeda dan diberikan berbagai pembatasan. Salah satu bentuk diskriminasi yang mereka alami adalah larangan untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan di Edo. Selain itu, wilayah kekuasaan mereka pun berada jauh dari pusat kekuasaan, berbeda dengan *Shimpan* dan *Fudai* yang diberi wilayah strategis di sekitar Edo. Meskipun terlihat seperti bentuk pengucilan, posisi yang jauh dari pusat pemerintahan justru memberikan keuntungan tersendiri bagi para *daimyo Tozama*. Dengan pengawasan yang tidak seketat terhadap *Shimpan* dan *Fudai*, mereka memiliki ruang gerak yang lebih bebas untuk menyusun strategi dan membangun kekuatan. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian *daimyo Tozama* untuk merancang perlawanan terhadap pemerintahan Shogun Tokugawa.

Situasi semakin memanas ketika Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat datang ke Jepang pada tahun 1853. Kedatangannya memicu perdebatan di kalangan *daimyo* yang kemudian terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah kelompok konservatif yang keras menolak masuknya bangsa Barat dan ingin mempertahankan Jepang dari pengaruh asing. Di sisi lain, muncul kelompok realis yang lebih pragmatis dan memilih untuk mendukung kebijakan pemerintahan *bakufu* serta Shogun dalam menghadapi tekanan luar negeri. Perbedaan pandangan inilah yang turut memperkeruh dinamika politik Jepang menjelang runtuhnya keshogunan.

Di tengah dinamika politik yang berkembang pada masa akhir pemerintahan Tokugawa, muncul pula kelompok nasionalis yang dipimpin oleh keluarga Tokugawa sendiri, khususnya

dari klan Mito—salah satu cabang *daimyo Shimpan*—yang diketuai oleh Tokugawa Mitsukuni. Kelompok ini memiliki pandangan bahwa kekuasaan sejati seharusnya berada di tangan Kaisar, bukan Shogun. Mereka percaya bahwa hanya Kaisar yang memiliki legitimasi penuh untuk memimpin Jepang secara sah.

Sebenarnya, gagasan nasionalisme ini telah muncul jauh sebelum kedatangan Komodor Perry dan intervensi bangsa Barat. Namun, ketidakmampuan pemerintah *bakufu* (keshogunan) dalam menghadapi tekanan asing dan melindungi kedaulatan Jepang membuat kelompok nasionalis akhirnya bergabung dengan kelompok konservatif. Mereka menilai bahwa Shogun telah gagal menjaga kehormatan bangsa.

Awalnya, perbedaan pandangan antara kelompok konservatif dan kelompok realis—yang mendukung kompromi dengan bangsa Barat—masih sebatas perdebatan di ranah politik. Namun, ketegangan mulai memuncak ketika pemerintah *bakufu* menyetujui pembukaan sejumlah pelabuhan Jepang tanpa terlebih dahulu meminta restu dari Kaisar. Situasi ini semakin memburuk ketika *bakufu* kembali menyepakati perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan negara-negara Barat tanpa keterlibatan atau persetujuan dari pihak kekaisaran. Keputusan-keputusan sepihak ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap otoritas Kaisar dan mendorong konflik terbuka antara pendukung kekaisaran dan pendukung Shogun.

Dalam kondisi politik yang semakin tidak stabil, banyak samurai merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan Shogun. Akibatnya, sejumlah besar dari mereka memilih untuk keluar dari sistem feodal dan menjadi *ronin*—samurai tanpa tuan. Sebagai *ronin*, mereka memperoleh kebebasan untuk bertindak sesuai dengan keyakinan mereka, dan sebagian besar dari mereka bersikap anti-Shogun sekaligus anti-asing. Para *ronin* ini kemudian membentuk kelompok yang dikenal sebagai *shishi*, atau "para pejuang dengan cita-cita mulia." Motivasi mereka bukan hanya untuk melawan pengaruh asing di Jepang, tetapi juga untuk memperburuk hubungan antara *bakufu* dan bangsa Barat. Mereka meyakini bahwa menciptakan kekacauan dan menyerang orang asing akan memaksa bangsa Barat menekan Shogun agar bertindak, yang pada akhirnya akan menggoyahkan legitimasi pemerintahannya. Akibatnya, aksi-aksi kekerasan terhadap warga asing pun semakin sering terjadi. Serangkaian serangan ini memicu reaksi dari negara-negara Barat, yang kemudian menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah *bakufu* dan menuntut perlindungan bagi warganya yang berada di Jepang. Tekanan internasional ini semakin menambah beban politik di pundak Shogun dan mempercepat

keruntuhan sistem pemerintahan feodal yang sudah rapuh.

Pada tahun 1859, pemerintah *bakufu* berusaha mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi ekonomi Jepang yang saat itu tengah berada dalam krisis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan sistem mata uang baru. Tujuannya adalah untuk menstabilkan nilai tukar dan meningkatkan daya beli masyarakat. Mata uang baru ini dirancang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang lama.

Sebagai perbandingan, pada masa sebelumnya, untuk memperoleh 1 dolar Meksiko—mata uang asing yang saat itu banyak digunakan dalam perdagangan internasional—diperlukan tiga koin perak Jepang. Namun dengan sistem mata uang baru, cukup satu koin perak yang dikeluarkan untuk nilai tukar yang sama. Langkah ini tentu saja dimaksudkan untuk memperkuat posisi ekonomi Jepang dalam perdagangan internasional. Sayangnya, kebijakan ini belum sempat diterapkan secara luas. Dua perwakilan negara asing yang memiliki pengaruh besar di Jepang pada masa itu, yaitu Townsend Harris dari Amerika Serikat dan Sir Rutherford Alcock dari Inggris, segera melayangkan protes. Mereka menilai perubahan nilai tukar ini merugikan pihak asing dalam transaksi perdagangan. Karena tekanan diplomatik yang cukup kuat, *bakufu* pun terpaksa membatalkan kebijakan tersebut dan menarik kembali mata uang baru yang sudah direncanakan. Sementara itu, dinamika politik Jepang juga mengalami perubahan penting. Pada tanggal 3 Februari 1867, Kaisar Kōmei meninggal dunia. Setelah wafatnya, tahta Kekaisaran langsung diwariskan kepada putranya yang masih muda, Mutsuhito. Pengangkatan Mutsuhito sebagai Kaisar menjadi titik awal dari babak baru dalam sejarah Jepang, yang kelak dikenal sebagai Restorasi Meiji.

Restorasi Meiji

Restorasi Meiji merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Jepang yang menandai transisi dari pemerintahan feodal di bawah Keshogunan Tokugawa menuju modernisasi di bawah pemerintahan Kaisar Meiji. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1868 dan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan Jepang, termasuk sistem pemerintahan, ekonomi, militer, pendidikan, dan hubungan internasional. Salah satu dampak utama dari Restorasi Meiji adalah keterbukaan Jepang terhadap bangsa asing, yang sebelumnya sangat dibatasi selama periode isolasi yang dikenal sebagai *sakoku*.

Sebelum Restorasi Meiji, Jepang menjalankan kebijakan isolasi yang diterapkan oleh Keshogunan Tokugawa sejak awal abad ke-17. Kebijakan ini membatasi hubungan dengan

negara asing, hanya mengizinkan perdagangan terbatas dengan Belanda dan Tiongkok melalui pelabuhan di Nagasaki. Namun, kebijakan ini mulai menghadapi tantangan seiring dengan meningkatnya tekanan dari negara-negara Barat yang ingin membuka Jepang untuk perdagangan internasional. Salah satu peristiwa yang memaksa Jepang untuk mulai membuka diri adalah kedatangan armada Amerika Serikat yang dipimpin oleh Komodor Matthew Perry pada tahun 1853. Perry membawa surat dari Presiden Amerika Serikat yang menuntut agar Jepang membuka pelabuhannya bagi kapal-kapal dagang asing. Setelah beberapa kali negosiasi, Jepang akhirnya menandatangani Konvensi Kanagawa pada tahun 1854, yang menjadi awal dari keterbukaan Jepang terhadap dunia luar.

Peristiwa ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Jepang, terutama di antara para samurai dan kaum nasionalis yang merasa bahwa pemerintahan Tokugawa telah gagal dalam menjaga kedaulatan negara. Ketidakpuasan ini semakin meningkat, yang akhirnya berujung pada kejatuhan Keshogunan Tokugawa dan pemulihan kekuasaan Kaisar Meiji pada tahun 1868. Pemerintahan baru di bawah Kaisar Meiji menyadari bahwa untuk bertahan dalam persaingan global dan menghindari nasib yang dialami oleh banyak negara Asia lainnya yang jatuh di bawah kekuasaan kolonial Barat, Jepang harus segera melakukan modernisasi. Oleh karena itu, pemerintah Meiji mulai mengambil langkah-langkah besar untuk membuka Jepang kepada dunia luar dan mengadopsi berbagai praktik serta teknologi dari negara-negara Barat.

Salah satu aspek utama dari keterbukaan Jepang selama Restorasi Meiji adalah reformasi di bidang ekonomi dan industri. Pemerintah Meiji mengadopsi model ekonomi dan teknologi dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat untuk membangun sektor industri yang kuat. Banyak ahli dari Barat diundang ke Jepang untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan reformasi pendidikan. Jepang mulai membangun jaringan kereta api, pabrik, serta sistem perbankan modern yang mengikuti standar internasional. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan banyak pelajar Jepang ke luar negeri untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi modern agar dapat diterapkan di Jepang.

Di bidang militer, Jepang mengadopsi sistem wajib militer yang terinspirasi dari model Prusia, yang menggantikan sistem lama yang bergantung pada samurai. Tentara Jepang yang baru dilengkapi dengan persenjataan modern dan dilatih dengan strategi militer yang digunakan oleh negara-negara Eropa. Reformasi ini menjadikan Jepang sebagai kekuatan militer yang semakin diperhitungkan di Asia, seperti yang terbukti dalam kemenangan mereka melawan

Tiongkok dalam Perang Sino-Jepang pertama (1894-1895) dan melawan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang (1904-1905).

Selain dalam aspek militer dan ekonomi, keterbukaan Jepang terhadap bangsa asing juga terjadi dalam bidang pendidikan dan budaya. Sistem pendidikan Jepang mengalami perubahan drastis dengan diperkenalkannya sistem sekolah nasional yang mengikuti model Barat. Bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa lainnya mulai diajarkan di sekolah-sekolah, sementara pemikiran dan filsafat Barat mulai berpengaruh dalam masyarakat Jepang. Namun, meskipun Jepang terbuka terhadap pengaruh asing, mereka tetap menjaga identitas nasional mereka dengan memilih dan menyesuaikan elemen-elemen budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional Jepang.

Keterbukaan Jepang selama Restorasi Meiji juga menyebabkan meningkatnya interaksi dengan bangsa asing. Banyak orang asing datang ke Jepang untuk bekerja sebagai penasihat dalam berbagai bidang, seperti teknik, pendidikan, dan militer. Di sisi lain, Jepang juga mulai memperluas hubungan diplomatiknya dengan berbagai negara, menandatangani perjanjian perdagangan, serta memperkuat posisinya dalam komunitas internasional.

Namun, keterbukaan Jepang terhadap bangsa asing pada masa Restorasi Meiji tidak sepenuhnya berjalan tanpa tantangan. Meskipun pemerintah berusaha untuk memodernisasi Jepang dengan cepat, terdapat perlawanan dari kelompok-kelompok yang masih berpegang pada nilai-nilai tradisional. Beberapa samurai yang merasa kehilangan hak-hak istimewanya memberontak terhadap pemerintah Meiji, seperti yang terjadi dalam Pemberontakan Satsuma pada tahun 1877. Selain itu, meskipun Jepang telah membuka diri, negara-negara Barat masih memandang Jepang sebagai negara yang belum setara, seperti yang terlihat dalam berbagai perjanjian yang bersifat tidak adil bagi Jepang. Baru setelah Jepang berhasil membuktikan kekuatan dan modernisasinya dalam beberapa dekade berikutnya, negara-negara Barat mulai mengakui Jepang sebagai kekuatan global yang setara.

Secara keseluruhan, Restorasi Meiji menjadi titik balik dalam sejarah Jepang yang membawa negara ini menuju era keterbukaan dan modernisasi. Dengan mengadopsi teknologi dan sistem dari Barat, Jepang berhasil berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan militer yang disegani di dunia. Keterbukaan Jepang terhadap bangsa asing selama periode ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas Jepang modern dan menjadi fondasi bagi perkembangan negara ini hingga saat ini.

KESIMPULAN

Pada abad ke-18, revolusi industri mendorong negara-negara Barat untuk mencari wilayah baru guna memperluas perdagangan, termasuk Jepang. Namun, sejak tahun 1633 hingga 1854, di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa Iemitsu, Jepang menerapkan kebijakan isolasi yang disebut Sakoku. Kebijakan ini bertujuan membatasi pengaruh asing, khususnya dari Portugis yang dianggap membawa ancaman melalui perdagangan, militer, dan penyebaran agama Kristen.

Kedatangan bangsa Portugis dan misionaris seperti Fransiskus Xaverius memicu kekhawatiran karena pesatnya penyebaran agama Kristen, terutama di kota Nagasaki. Pemerintah Tokugawa merespons dengan keras, termasuk penganiayaan terhadap penganut Kristen dan mewajibkan rakyat menunjukkan kesetiaan kepada agama Buddha. Penindasan ini memuncak dalam Pemberontakan Shimabara, yang melibatkan petani dan umat Kristen.

Meskipun Jepang tertutup, hubungan dagang tetap terbatas dilakukan dengan Belanda dan Korea. Namun, pada tahun 1853, Amerika Serikat melalui Komodor Matthew Perry memaksa Jepang membuka diri dengan kekuatan militer. Hasilnya, Jepang menandatangani Konvensi Kanagawa tahun 1854 yang mengakhiri isolasi dan membuka hubungan dagang dengan negara-negara Barat lainnya, termasuk Rusia dan Inggris.

Setelah Jepang mengakhiri masa isolasi, negara itu mengalami kekacauan akibat campur tangan negara-negara Barat, terutama Inggris, Belanda, dan Prancis. Meskipun Amerika Serikat yang pertama kali membuka hubungan dengan Jepang, mereka tidak terlalu terlibat karena sedang mengalami Perang Saudara. Sementara Rusia sama sekali tidak ikut campur karena fokusnya lebih pada wilayah utara dan kurang tertarik berdagang dengan Jepang.

Pembukaan Jepang oleh Shogun Tokugawa dilakukan tanpa izin Kaisar, yang memicu ketegangan internal. Kelompok-kelompok yang menentang kepemimpinan Shogun, termasuk para samurai yang menjadi ronin, mulai bergerak untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan Kaisar. Mereka menentang pengaruh asing dan menjadikan kekerasan sebagai cara untuk menunjukkan perlawanan, seperti yang dilakukan kelompok shishi terhadap warga asing.

Dalam struktur kekuasaan Tokugawa, terdapat tiga jenis daimyo: Shimpan (keluarga Tokugawa), Fudai (pendukung Tokugawa), dan Tozama (luar Tokugawa, yang dulunya mendukung Toyotomi Hideyoshi). Daimyo Tozama merasa tersisih dan memanfaatkan letak geografis mereka yang jauh dari pusat kekuasaan di Edo untuk menyusun perlawanan terhadap

Shogun.

Kedatangan Perry memperkuat perpecahan antara kelompok konservatif (menolak Barat) dan realis (mendukung Shogun dan kerja sama dengan Barat). Ada pula kelompok nasionalis, yang dipimpin klan Mito dari Tokugawa Shimpan, yang ingin mengembalikan kekuasaan ke Kaisar, berdasarkan keyakinan bahwa hanya Kaisar yang berhak memimpin Jepang.

Ketegangan memuncak saat Shogun menyetujui pembukaan pelabuhan tanpa restu Kaisar, yang memicu perlawanan bersenjata antara pendukung Kaisar dan Shogun. Dalam situasi ini, para samurai yang kecewa menjadi ronin dan mendukung gerakan perlawanan seperti shishi. Sementara itu, Bafuku mencoba memperbaiki ekonomi Jepang dengan reformasi mata uang, tetapi dihentikan oleh tekanan dari Barat.

Akhirnya, ketika Kaisar Komei wafat dan digantikan oleh Kaisar Mutsuhito pada 1867, gerakan restorasi kekaisaran mencapai puncaknya. Tokoh-tokoh penting dari wilayah seperti Satsuma, Choshu, Tosa, dan lainnya mendukung pengalihan kekuasaan secara damai kepada Kaisar demi stabilitas nasional, sekaligus memberi kesempatan kepada keluarga Tokugawa untuk tetap berperan dalam pemerintahan baru.

Restorasi Meiji adalah titik balik penting dalam sejarah Jepang yang terjadi pada tahun 1868, saat kekuasaan berpindah dari pemerintahan feodal Tokugawa ke pemerintahan pusat di bawah Kaisar Meiji. Perubahan ini membuka jalan bagi modernisasi besar-besaran di berbagai bidang, termasuk sistem pemerintahan, ekonomi, militer, pendidikan, dan hubungan luar negeri.

Sebelumnya, Jepang menerapkan kebijakan isolasi (sakoku) yang membatasi kontak dengan negara asing. Namun, kedatangan Komodor Perry dari Amerika Serikat pada 1853 memaksa Jepang membuka pelabuhannya melalui Konvensi Kanagawa (1854), yang menjadi awal keterbukaan Jepang terhadap dunia luar. Hal ini memicu ketidakpuasan rakyat, terutama para samurai dan nasionalis, karena pemerintahan Tokugawa dianggap lemah. Situasi ini mendorong kejatuhan Tokugawa dan lahirnya pemerintahan baru di bawah Kaisar Meiji

Pemerintah Meiji sadar bahwa Jepang harus cepat mengejar ketertinggalan dari negara-negara Barat agar tidak dijajah. Mereka mulai mengadopsi teknologi dan sistem Barat, membangun industri, jaringan kereta api, sistem perbankan, serta mengirim pelajar ke luar negeri. Di bidang militer, Jepang menciptakan tentara modern berdasarkan sistem wajib militer ala Prusia, menggantikan peran samurai.

Sistem pendidikan juga direformasi besar-besaran dengan mengadopsi kurikulum Barat, memperkenalkan bahasa asing, dan membuka akses pendidikan nasional. Meski terbuka terhadap budaya asing, Jepang tetap menjaga nilai-nilai tradisionalnya dengan menyaring pengaruh luar yang dianggap sesuai.

Keterbukaan ini mendorong masuknya tenaga asing ke Jepang dan memperluas hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Namun, proses modernisasi tidak tanpa hambatan. Beberapa kelompok tradisional menolak perubahan, seperti dalam Pemberontakan Satsuma (1877), dan Jepang sempat dipandang rendah oleh Barat karena perjanjian yang tidak adil. Baru setelah Jepang menang dalam perang melawan Tiongkok dan Rusia, negara-negara Barat mulai mengakui kedudukannya sebagai kekuatan global.

Secara keseluruhan, Restorasi Meiji mengubah Jepang dari negara tertutup menjadi negara modern yang kuat, dan membentuk dasar dari Jepang yang kita kenal saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- MUNAWWAROH, Wardatul, et al. PEMBUKAAN NEGARA JEPANG OLEH BANGSA BARAT PADA MASA KESHOGUNAN TOKUGAWA TAHUN 1791-1867. Idsejarah.net. (2015, September). Sejarah Terbentuknya Negara Jepang.
- Kompas.com. (2021, August 17). Kebijakan Sakoku, Penutupan Diri Jepang.
- Kompas.com. (2021, August 17). Kebijakan Sakoku, Penutupan Diri Jepang [Sumber: Britannica].
- Ketelaar, J. E. (2018). Christianity in Early Modern Japan*. In Oxford Research Encyclopedia of Religion. Oxford University Press.
- P2K STEKOM. (n.d.). Pemberontakan Shimabara.
- Munawwaroh, W. (2015). Pembukaan Negara Jepang oleh Bangsa Barat pada Masa Keshogunan Tokugawa Tahun 1791–1867 (Skripsi Sarjana, Universitas Jember). Digital Repository Universitas Jember.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. (1950). Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Selatan. Jakarta: Departemen Penerangan RI